



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**

# **RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI**

**TAHUN 2025**



## KATA PENGANTAR

Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 ini merupakan rencana yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana kerja (Renja) Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun OPD guna mendukung kelangsungan tugas pokok dan fungsi sehari-hari. Dimana penyusunan Rencana kerja (Renja) Perubahan OPD ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan amanat Undang-undang Dasar 1945, dimana dengan melaksanakan fungsi penyusunan dokumen berarti OPD telah menjalankan tugas mereka sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang menjalankan fungsi otonomnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi merupakan OPD teknis dari Pemerintah Kota Jambi yang terlebih dahulu wajib menyusun Rencana kerja (Renja) Perubahan OPD sebelum pelaksanaan anggaran dimulai, dimana dokumen ini biasa disebut dengan Renja Tahunan OPD yang berguna untuk menjamin pelaksanaan kegiatan OPD selama satu tahun anggaran yaitu tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa apa yang kami tuangkan dalam Dokumen ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, saran dan masukan yang sifatnya untuk perbaikan atas isi dokumen ini akan sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan terbuka.

Akhir kata, semoga dokumen yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semua pihak. dan taklupa pula ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Renja OPD ini.

Jambi, Juni 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA JAMBI**



**MAHRUZAR, ST**  
Pembina Tk.I

**NIP. 19780127 200501 1 004**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi .....	3
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi .....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi .....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.....	41
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	41
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPRKP KOTA JAMBI .....	60
BAB V PENUTUP .....	67



## DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.....	14
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi .....	26
Tabel T-C.31.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi .....	29
Tabel T-C.32.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi .....	40
Tabel 3.1.	Prioritas dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	44
Tabel 3.2.	Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	45
Tabel 3.3.	Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	45
Tabel 3.4.	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	46
Tabel T-C.33.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi .....	50



## BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan yang disingkat Renja Perubahan mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja Perubahan OPD sebagai penjabaran Renstra OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kota Jambi ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Proses penyusunan Renja Perubahan dan Renstra Perangkat Daerah semakin penting peranannya dikaitkan dengan pemendagri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi JPD dan JMD, serta tata cara pembukuan didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja Perubahan OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi



sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Perubahan OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Jambi.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Perubahan tahun 2025 juga disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga ada perbedaan mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi tahun 2025.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Perubahan OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perubahan OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan perbaikan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing serta 6 peroritas pembangunan di Kota Jambi yakni peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pemberdayaan pasyarakat, peningkatan produktivitas, pengembangan pariwisata dan investasi daerah, good governance dan ketentraman dan ketertiban Umum dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara, Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025.
9. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rancangan Peraturan Daerah
10. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kota Jambi, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan dengan kondisi di lapangan yang akan dikerjakan pada tahun anggaran berikutnya. Tujuan penyusunan Renja Perubahan lainnya adalah mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

### **1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Penerimaan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Kota Jambi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI**

## **BAB V PENUTUP**



## **BAB II** **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Tahun Lalu dan Capaian Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Perubahan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi Tahun Lalu juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Perubahan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi Tahun Lalu meliputi 3 (tiga) hal yaitu : (1) **kebijakan** perencanaan program dan kegiatan, (2) **pelaksanaan** rencana program dan kegiatan, (3) **hasil** rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu sebagai bahan dalam Penyusunan Perencanaan Tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun Anggaran 2024 melaksanakan 2 (Dua) Urusan pemerintah yaitu urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan 5 (lima) program, dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sbb:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

##### **a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :



1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp49.272.755,- Realisasi belanja sebesar Rp56.397.050,- dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, bahan komputer, kertas dan cover, bahan cetak, alat listrik, jasa tenaga administrasi, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota. Realisasi Keuangan 91,77%.

2. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.15.740.910,- Realisasi belanja sebesar Rp19.168.080,- dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, jasa tenaga administrasi dan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN. Realisasi Keuangan 84,82%.

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.6.108.932.211,- Realisasi belanja sebesar Rp3.598.366.635 dengan keluaran berupa belanja gaji pokok ASN, tunjangan keluarga ASN, tunjangan jabatan ASN, tunjangan fungsional umum ASN, tunjangan beras ASN, tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS, iuran jaminan kesehatan ASN, iuran jaminan kecelakaan kerja ASN, iuran jaminan kematian ASN, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN. Realisasi Keuangan 80,21%.

2. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.293.240.000,- Realisasi belanja sebesar Rp176.561.400,- dengan keluaran berupa belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan, Bahan Cetak, Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, serta Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN. Realisasi Keuangan 89,38%.

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.26.279.550,- Realisasi belanja sebesar Rp34.037.700,- dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, jasa tenaga administrasi, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota. Realisasi Keuangan 82,64%.



**c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Dengan sub kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.66.600.000,- Realisasi belanja sebesar Rp56.250.000,- dengan keluaran berupa belanja Pakaian Dinas Harian (PDH). Realisasi Keuangan 90,09%
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,- Realisasi belanja sebesar Rp11.500.000,- dengan keluaran berupa belanja bimbingan teknis. Realisasi Keuangan 32,86%.

**d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.7.606.830,- Realisasi belanja sebesar Rp8.402.300,- dengan keluaran berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik. Realisasi Keuangan 89,96%
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.163.876.274,- Realisasi belanja sebesar Rp142.954.555,- dengan keluaran berupa belanja bahan bangunan dan konstruksi, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, materai, bahan komputer, Parabot kantor, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, iuran jaminan kerja bagi non ASN. Realisasi Keuangan 85,66%
3. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan  
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.35.456.638,- Realisasi belanja sebesar Rp67.730.500,- dengan keluaran berupa belanja bahan cetak dan materai. Realisasi Keuangan 97,95%
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp17.599.050,- Realisasi belanja sebesar Rp8.659.000,- dengan keluaran berupa belanja makanan dan minuman rapat. Realisasi Keuangan 49,20%
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp240.467.200,- Realisasi belanja sebesar Rp224.592.942,- dengan keluaran berupa belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas biasa. Realisasi Keuangan 93,40%.



**e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Mebel

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp77.114.475,- Realisasi belanja sebesar Rp75.780.000,- dengan keluaran berupa belanja modal meubel. Realisasi Keuangan 98,27%.

2. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp294.133.079,- Realisasi belanja sebesar Rp292.600.000,- dengan keluaran berupa belanja Modal alat Pendingin, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya, Belanja Modal Alat Studio, Belanja Modal Personel Komputer, serta Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya. Realisasi Keuangan 99,48%.

**f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp2.500.000,- Realisasi belanja sebesar Rp2.500.000,- dengan keluaran berupa belanja materai. Realisasi Keuangan 100,00%.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp141.000.000, Realisasi belanja sebesar Rp82.057.529,- dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer, jasa tenaga administrasi, tagihan telepon, tagihan air, tagihan listrik, internet/tv berlangganan, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN serta belanja peralatan jaringan. Realisasi Keuangan 58,20%.

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp291.204.800,-, Realisasi belanja sebesar Rp224.261.500,- dengan keluaran berupa belanja bahan bakar dan pelumas, suku cadang alat angkutan, alat tulis kantor, kertas dan cover, materai, bahan komputer, jasa tenaga administrasi, pembayaran pajak, bea,



dan perizinan serta iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, Realisasi Keuangan 77,01%.

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp111.293.800,- Realisasi belanja sebesar Rp49.725.800,- dengan keluaran berupa belanja jasa tenaga operator komputer, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN, Pemeliharaan alat kantor(alat pendingin) dan pemeliharaan peralatan komputer. Realisasi Keuangan 44,68%.

## 2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Dengan kegiatan sebagai berikut:

**a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Tertangani Alokasi anggaran kegiatan ini Rp100.000.000, Realisasi belanja sebesar Rp 99.456.000,-, Realisasi Keuangan 99,46%.

**b. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/Atau Rumah Khusus**

1. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp147.642.640,- Realisasi belanja sebesar Rp119.844.255,- dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, pakaian dinas harian (PDH), jasa tenaga operator komputer, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik, tagihan listrik dan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN . Realisasi Keuangan 81,17%.

**c. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp62.135.941,- Realisasi belanja sebesar Rp59.565.610,- Dana tersebut digunakan untuk biaya belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, materai, bahan komputer, perabot kantor, belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga administrasi, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan rekayasa teknik, dan perjalanan dinas. Realisasi Keuangan 95,86%.



2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp267.752.300,- Realisasi belanja sebesar Rp248.544.036,- Dana tersebut digunakan untuk biaya belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, materai, bahan komputer, perabot kantor, belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga administrasi, jasa tenaga operator komputer, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan rekayasa teknik, perjalanan dinas, dan belanja modal olar/tugu/tanda lainnya. Realisasi Keuangan 92,84%.

**3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

**a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp33.990.900,- Realisasi belanja sebesar Rp29.240.527,- Dana tersebut digunakan Belanja kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, serta perjalanan dinas biasa dan dalam kota. Realisali Keuangan 86,02%.

**b. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan/atau Review Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp404.590.960,- Realisasi belanja sebesar Rp399.788.500,- Dana tersebut digunakan Belanja kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, serta jasa konsultasi perencanaan penata ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan. Realisali Keuangan 98,81%.

**c. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.997.301.258,-, Realisasi Belanja sebesar Rp1.986.507.731,- Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, materai, bahan komputer,



belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga administrasi, jasa tenaga ahli, jasa tenaga informasi dan teknologi, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, jasa konsultasi konstruksi, jasa konsultasi pengawasan arsitektur, jasa konsultasi pengawasan penataan ruang, perjalanan dinas biasa dan dalam kota, bantuan sosial, belanja modal tugu/tanda batas lainnya, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Realisasi keuangan 99,46%.

#### **4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

Dengan kegiatan sebagai berikut:

##### **a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp111.065.042,- Realisasi belanja sebesar Rp106.513.600,- Dana tersebut digunakan Belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, jasa tenaga admionistrasi, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, jasa konsultasi konstruksi. Realisasi Keuangan 95,90%.

##### **2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp32.550.448.009,- Realisasi belanja sebesar Rp31.604.079.957,- Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan bangunan dan kontruksi, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak bahan komputer, parabot kantor, alat listrik, belanja makanan dan minuman, pakaian dinas lapangan, pakaian siaga, pakaian olahraga, jasa kantor, jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga supir, jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik, belanja tagihan listrik, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, jasa konsultasi konstruksi, belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman, belanja modal. Realisasi Keuangan 97,09%.

##### **3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp136.136.354,- Realisasi belanja sebesar Rp131.254.519,-, Dana tersebut digunakan belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, perlengkapan dinas, belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga administrasi, jasa tenaga pelayanan umum, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, perjalanan



dinas biasa dan dalam kota, belanja bantuan sosial. Realisasi Keuangan 96,41%.

4. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang  
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp20.371.776,- Realisasi sebesar Rp19.458.900,- dana tersebut di gunakan untuk belanja alat listrik. Realisasi Keuangan 95,52%.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan tahun lalu (tahun n-2 = 2025-2 = 2024) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
  - a. Pada tahun ini tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - b. Program Pengembangan Perumahan
  - c. Program Kawasan Permukiman
  - d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
  - a. Pada tahun ini tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan
4. Faktor-faktor Penyebab :
  - a. Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan SPM Standard Pelayanan Minimal yaitu:
    - Adanya refocusing anggaran pada beberapa program kegiatan dan sub kegiatan sehingga pelaksanaan rapat koordinasi menjadi terbatas.
  - b. Faktor Penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu:
    - Adanya Komitmen bersama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman beserta mitra kerjanya untuk melaksanakan program dan kegiatan.
    - Berusaha Seoptimal mungkin untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kerangka acuan yang direncanakan.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang Perlu Diambil untuk mengatasi Faktor-faktor Penyebab.



***DPRKP/KOTA JAMBI/2025***

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

- Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2024 dan Renstra 2023 – 2025.
- Efisiensi alokasi belanja
- Penambahan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target
- Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan koordinasi lintas instansi, sinergitas program/kegiatan sejenis dengan instansi terkait, presentasi pada pemangku kebijakan tentang kondisi yang ada dan memaksimalkan sumberdaya yang ada.



Tabel T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi**

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja Perubahan Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01.04.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	81,10%	BB	-	-
	1.04.01.2.01 <u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Peningkatan Nilai AKIP	80%	80%	76	76,55	89,90%	76%	-	-
	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7	91,77%	7 dokumen	-	-



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	84,82%	1 Laporan	-	-
<b>1.04.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80,61%</b>	<b>100%</b>	-	-
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	34 Orang	40 Orang	34	80,21%	40 Orang	-	-
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	2500 Dokumen	1 Dokumen	2500	89,38%	2500 Dokumen	-	-
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12	82,64%	12 Laporan	-	-
<b>1.04.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>69,53%</b>	<b>100%</b>	-	-
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	81 Paket	81 Paket	75 Paket	81	90,09%	75 Paket	-	-



DPRKP/KOTA JAMBI/2025

1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	5 Orang	7 Orang	5	32,86%	15 Orang	-	-
<b>1.04.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>89,85%</b>	<b>100%</b>	-	-
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1	89,96%	1 Paket	-	-
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1	85,66%	1 Paket	-	-
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1	97,95%	1 Paket	-	-
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	16 Laporan	5 Laporan	16	49,20%	5 Laporan	-	-
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	47 Laporan	30 Laporan	47	93,40%	30 Laporan	-	-



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

1.04.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>99,23%</b>	<b>100%</b>	-	-
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			35 Unit	17	98,27%	35 unit	-	-
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	5 unit	21 unit	5	99,48%	21 unit	-	-
1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				1 Unit	-	-
1.04.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>58,93%</b>	<b>100%</b>	-	-
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	2.700 Surat	2.744 Surat	4 Laporan	2744	100,00%	4 Laporan	-	-
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12	58,20%	12 Laporan	-	-
1.04.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>68,07%</b>	<b>100%</b>	-	-



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	29 unit	29 unit	29	77,01%	29 unit	-	-
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 unit	89 unit	97 Unit	89	44,68%	97 unit	-	-
2	<b>01.04.02</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR.</b>	<b>65%</b>	<b>75%</b>	<b>79,67%</b>	<b>75,00%</b>	<b>91,33%</b>	<b>79.67%</b>	-	-
	1.04.02.2.03	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Korban Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,46%</b>	<b>100%</b>	-	-
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	-	1 Dokumen	1	99,46%	10 Unit Rumah	-	-
	1.04.02.2.05	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>Terlaksananya Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>81,17%</b>	<b>100,00%</b>	-	-
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	81,17%	1 Dokumen	-	-



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

	1.04.02.2.06	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,41%	100,00%	-	-
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	40 Dokumen	40 Dokumen	1 Dokumen	1	95,86%	1 Dokumen	-	-
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	40 Laporan	36 Laporan	5 Laporan	36	92,84%	5 Laporan	-	-
3	1.04.03	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</b>	33,97%	33,97%	45,48%	75,65%	98,71%	35,95%	-	-



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	86,02%	100,00%	-	-
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	-	-	1 Laporan	1	86,02%	1 Laporan	-	-
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	100%	100%	100,00%	100,00%	98,81%	100%	-	-
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Review Kebijakan PKP yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	5	98,81%	3 Dokumen	-	-
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	100,00%	100,00%	45,48%	100,00%	99,35%	35,95%	-	-



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	74 unit	74 unit	81 Unit	81	99,46%	81 unit	-	-
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1	89,81%	1 Laporan	-	-
4	01.04.05	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.</b>	<b>93,16%</b>	<b>93,27%</b>	<b>93,59%</b>	<b>94,11%</b>	<b>97,08%</b>	<b>93,27%</b>	-	-
	1.04.05.2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.</b>	<b>93,16%</b>	<b>93,27%</b>	<b>93,59%</b>	<b>94,11%</b>	<b>97,08%</b>	<b>93,27%</b>	-	-
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	95,90%	1 Dokumen	-	-
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	500 Lokasi	453 Lokasi	500 Lokasi	453	97,09%	500 Lokasi	-	-



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10	96,41%	10 Laporan	-	-
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	40 Laporan	22 Laporan	1 Laporan	22	95,52%	1 Laporan	-	-
<b>5</b>	<b>01.04.06</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan</b>			<b>10,00%</b>	<b>94,11%</b>	<b>40,50%</b>			
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan			<b>10,00%</b>	<b>94,11%</b>	<b>40,50%</b>			



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			1 Laporan	1	40,50%		
-------------------	---	--	--	--	-----------	---	--------	--	--



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan *bottom-up* dan *top down*, yang dikenal dengan istilah *shopping list key working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lebih terbuka, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tujuan dan sasaran yang akan di capai, sebagai berikut :

### 2.3 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

### 2.4 Sasaran yang akan dicapai adalah :

- Optimalnya capaian indikator Kinerja Utama
- Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan perumahan seperti jalan jalan lingkungan, parit/drainase dll



2.5 Sedangkan Indikator Kinerja Sasarannya adalah sebagai berikut :

- Persentase indikator kinerja utama daerah sesuai target

Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut diatas, akan kami uraikan dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan tersebut dibawah ini :



**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi**

NO	Indikator IKK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		139,24	160,60	167,57	174,54	139,24	139,24	160,60	167,57	174,54	
2	Jumlah unit peningkatan kualitas rumah RTLH		1.804,00	1.909,00	2.009,00	2.109,00	1.735,00	1.809,00	1.909,00	2.009,00	2.109,00	
3	Jumlah Backlog Rumah Tertangani		26.910,00	31.746,00	31.878,00	32.010,00	26.201,00	31.049,00	31.746,00	31.878,00	32.010,00	
4	Jumlah Lampu Jalan Tertangani		23.725,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	22.375,00	23.754,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	
5	Jumlah Lokasi Makam Tertangani		57,00	60,00	65,00	70,00	43,00	57,00	60,00	65,00	70,00	



### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan perumahan seperti jalan jalan lingkungan, parit/drainase dll.
2. Serah terima PSU Perumahan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup masyarakat.
3. Terlaksananya penanganan kawasan kumuh yang tercantum dalam SK Walikota Jambi.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program /kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan pada Pemerintah Kota Jambi dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Jambi terdapat perubahan yang tertuang dalam dokumen RKPD. Perbandingan antara rencana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan untuk rasionalisasi antara rancangan awal RKPD dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Jambi yang selanjutnya dilakukan penyesuaian anggaran pada program/kegiatan dan penundaan pelaksanaan program/kegiatan dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan RKPD tahun 2025. Dimana Terkait masing masing OPD telah mendapatkan pagu maka ada program kegiatan yang berubah nilainya dan ada kegiatan yang tidak bisa dimasukkan dalam Rencana Kerja Perubahan namun ada beberapa program baru yang diusulkan prioritas.

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi



***DPRKP/KOTA JAMBI/2025***

merencanakan untuk melaksanakan 4 (empat) program yang dijabarkan dalam 19 (sembilan belas) kegiatan dan 128 (seratus dua puluh delapan) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 56.031.127.727,00. Pagu Indikatif DPRKP mengalami kenaikan sebesar Rp 682.497.517,00. Kenaikan pagu indikatif ini sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. Rasionalisasi anggaran dilakukan dengan tanpa merubah output kegiatan maupun target kinerja output kegiatan.

Adapun hasil review rancangan awal RKPD dengan Analisis kebutuhan dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	6.748.143.996	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	6.748.143.996	
	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Kota Jambi	Peningkatan Nilai AKIP	78	110.458.022	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Kota Jambi	Peningkatan Nilai AKIP	78	110.458.022	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	67.095.860	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	67.095.860	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	43.362.162	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	43.362.162	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Tertib administrasi keuangan	100%	4.924.962.601	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Tertib administrasi keuangan	100%	4.924.962.601	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	4.485.560.521	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	4.485.560.521	



DPRKP/KOTA JAMBI/2025

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	387.380.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	387.380.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	52.021.280	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	52.021.280	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Jambi</b>	<b>Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>141.600.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Jambi</b>	<b>Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>141.600.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 80	80 Paket	66.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 80	80 Paket	66.600.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	75.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	75.000.000	



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Jambi</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>601.421.618</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Jambi</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>601.421.618</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.336.765	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.336.765	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	186.255.563	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	186.255.563	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	97.763.040	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	97.763.040	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	17.599.050	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	17.599.050	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	290.467.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	290.467.200	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Jambi</b>	<b>Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>362.388.755</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Jambi</b>	<b>Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>362.388.755</b>	
Pengadaan Mebel	Kota Jambi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	198.286.355	Pengadaan Mebel	Kota Jambi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	198.286.355	



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	164.102.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	164.102.400	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Jambi	<b>Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>167.500.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Jambi	<b>Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>167.500.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Kota Jambi</b>	Jumlah Surat Menyurat	3 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Kota Jambi</b>	Jumlah Surat Menyurat	3 Laporan	2.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Jambi	<b>Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>439.813.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Jambi	<b>Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>439.813.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Kota Jambi</b>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	301.909.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Kota Jambi</b>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	301.909.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	137.903.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	137.903.400	
<b>2</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	Kota Jambi	<b>Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR.</b>	<b>80,00%</b>	<b>743.813.079</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	Kota Jambi	<b>Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR.</b>	<b>80,00%</b>	<b>743.813.079</b>	



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	Kota Jambi	<b>Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>100,00%</b>	<b>162.943.938</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	Kota Jambi	<b>Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>100,00%</b>	<b>162.943.938</b>	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	<b>Kota Jambi</b>	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	162.943.938	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	<b>Kota Jambi</b>	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	162.943.938	
	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	Kota Jambi	<b>Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.869.141</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	Kota Jambi	<b>Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.869.141</b>	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	<b>Kota Jambi</b>	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	286.086.344	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	<b>Kota Jambi</b>	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	286.086.344	



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Laporan	294.782.797	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Laporan	294.782.797	
3	Program Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	37,83%	4.905.641.758	Program Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	37,83%	4.905.641.758	
		Kota Jambi	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	79,97%			Kota Jambi	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	79,97%		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100,00%	51.611.150	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100,00%	51.611.150	



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	51.611.150	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	51.611.150	
<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Kota Jambi	<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</b>	<b>79,97%</b>	<b>327.296.585</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Kota Jambi	<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</b>	<b>79,97%</b>	<b>327.296.585</b>	
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	<b>Kota Jambi</b>	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	3 Dokumen	327.296.585	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	<b>Kota Jambi</b>	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	3 Dokumen	327.296.585	
<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Kota Jambi	<b>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</b>	<b>37,83%</b>	<b>4.526.734.023</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Kota Jambi	<b>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</b>	<b>37,83%</b>	<b>4.526.734.023</b>	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	<b>Kota Jambi</b>	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	200 unit	4.489.547.343	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	<b>Kota Jambi</b>	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	200 unit	4.489.547.343	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	37.186.680	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan	1 Laporan	37.186.680	



DPRKP/KOTA JAMBI/2025

								Permukiman Kumuh			
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kota Jambi	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	94,62%	40.549.352.642	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kota Jambi	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	94,62%	40.549.352.642	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Jambi	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	94,62%	40.549.352.642	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Jambi	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	94,62%	40.549.352.642	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	2 Dokumen	144.207.426	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	2 Dokumen	144.207.426	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Jambi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	400 Lokasi	40.214.743.061	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Jambi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	400 Lokasi	40.214.743.061	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10 Laporan	167.758.929	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10 Laporan	167.758.929	



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	22.643.226	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	22.643.226	
				<b>52.946.951.475</b>					<b>52.946.951.475</b>	



#### **DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

Review Rancangan Awal Renja Perubahan RKPD Tahun 2025, meliputi aspek :

1. Menyusun ulang Program dan Kegiatan yang ada di Rencana Strategis 2024-2025, disesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang mengatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah khususnya untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. Perumahan dan Permukiman
  - Percepatan serah terima prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Perumahan dalam wilayah Kota Jambi dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Jambi.
  - Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang rumah sehat melalui penyuluhan-penyuluhan dikelurahan dalam kota jambi.
  - Penyuluhan rumah sehat serta inventarisasi rumah tidak layak huni.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang kota

Untuk menciptakan kawasan yang tertata, tertib dan teratur maka diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan membentuk tim pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan dalam kota Jambi serta pengendalian terhadap perizinan yang dikeluarkan.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang melalui aplikasi Simreda (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah) dan yang akan menjadi prioritas utama harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang signifikan, terukur dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat;
2. Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sesuai dan sejalan dengan Visi, Misi, Program Daerah yang telah dituangkan dalam RPJM Kota Jambi Tahun 2024-2025.



Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	<b>Program Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum</b>				
	Lampu Jalan	Kecamatan Alam Barajo	Pemasangan Lampu Jalan	52 <u>Unit</u>	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Danau Sipin	Pemasangan Lampu Jalan	63 Unit	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Jambi Selatan	Pemasangan Lampu Jalan	87 Unit	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Jambi Timur	Pemasangan Lampu Jalan	23 Unit	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Jelutung	Pemasangan Lampu Jalan	74 Unit	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Kota Baru	Pemasangan Lampu Jalan	310 Unit	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Paalmerah	Pemasangan Lampu Jalan dengan Tiang	187 Unit	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Pasar	Pemasangan Lampu Jalan dengan Tiang	56 Unit	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir



DPRKP/KOTA JAMBI/2025

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kecamatan Pelayangan	Pemasangan Lampu Jalan dengan Tiang	5 Unit	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Telanaipura	Pemasangan Lampu Jalan dengan Tiang	132 Unit	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
	<b>Pagar TPU</b>	Kecamatan Telanaipura	Pembuatan Pagar	300 Meter	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
	<b>Bedah Rumah</b>	Kecamatan Danau Sipin	Bedah Rumah	8 Rumah	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Jambi Timur	Bedah Rumah	1 Rumah	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Jelutung	Bedah Rumah	5 Rumah	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Kota Baru	Bedah Rumah	15 Rumah	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Pall Merah	Bedah Rumah	6 Rumah	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Pasar Jambi	Bedah Rumah	5 Rumah	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Telanaipura	Bedah Rumah	5 Rumah	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
	<b>Pembangunan wc/septitank</b>	Kecamatan Pasar	Pembangunan wc/Septitank	2 Titik	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir
	<b>Pengadaan Tempat Pemakaman Umum</b>	Kecamatan Alam Barajo	Pengadaan TPU	2 Titik	Usulan Kecamatan & Aspirasi/Pokir Pokir



## **BAB III**

# **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:

#### **3.1.1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional perumahan dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:

- Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk mewujudkan Kota tanpa permukiman kumuh.
- Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat

Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang dimanatkan dalam Undang- Undang nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.
- 2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan.
- 3) Pembangunan Perumahan beserta prasarana sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

#### **3.1.2. Undang - Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam penyelenggaraan



perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- 2) menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- 4) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- 5) melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan
- 6) industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
- 7) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- 8) melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
- 9) melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- 10) melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- 11) melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- 12) melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- 13) mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat



kabupaten/kota;

- 14) mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- 15) memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- 16) menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
- 17) memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

### 3.1.3. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019

Pada Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015, tercantum visi, misi, arah kebijakan dan pengembangan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Perumahan sebagai berikut:

- Visi : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.
- Misi yang berkaitan dengan Bidang Perumahan Rakyat : Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua".

Sasaran Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat :

- 1) Meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan perumahan
- 2) Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi PSU pendukungnya.
- 3) Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara.
- 4) Terwujudnya keswadayaan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- 5) Pembinaan umum dan pengembangan rumah umum dan komersial:
  - a. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial



- b. Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan Rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas
- c. Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN.

3.1.4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pasal 4 disebutkan bahwa fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, permukiman dan utilitas perkotaan;
- b. Penyelenggaraan urusan perumahan, permukiman dan utilitas perkotaan;
- c. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan utilitas perkotaan;
- d. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan pihak-pihak lain;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Tabel 3.1**  
**Prioritas dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran DPRKP	Indikator Sasaran DPRKP
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan dan permukiman	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni



### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

#### 3.2.1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan .”

#### 3.2.2. Sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran Dinas Perumahan dalam mewujudkan tujuan organisasi melalui penyusunan Rencana Kerja OPD adalah :

“Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan berketahanan Iklim.”

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan dijelaskan pada Tabel 3.2 dan 3.3 berikut ini

**Tabel 3.2**  
**Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Tujuan DPRKP	Indikator Tujuan DPRKP	Target Kinerja Tujuan DPRKP Tahun 2025
1	2	3	4
1	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	7,73

**Tabel 3.3**  
**Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Sasaran DPRKP	Indikator Sasaran DPRKP	Target Kinerja Sasaran DPRKP Tahun 2025
1	2	3	4
1	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan berketahanan Iklim	Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Perumahan dan Permukiman	7,73



**Tabel 3.4**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Indikator Kinerja Utama DPRKP	Target Indikator Kinerja Utama DPRKP Tahun 2025
1	2	3
1	Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Perumahan dan Permukiman	7,73

### **3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

#### **3.3.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan**

Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, antara lain:

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan Dan Permukiman Layak Huni
- Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Berkualitas
- Kebijakan Anggaran Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kota Jambi sangat terbatas sehingga ditetapkan program dan kegiatan dengan prioritas anggaran diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah, maka ditetapkan pagu indikatif. Kebijakan atas pagu indikatif dilakukan melalui proses penganggaran, yaitu dengan memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **3.3.2. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.



Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 :

**Rekapitulasi Program dan Kegiatan**  
**Berdasarkan Program Prioritas Tahun 2025**

No	Nama Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	<b>01.04.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8.649.672.802</b>	
<b>01.01</b>	<b>1.04.01.2.01 <u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u></b>	<b>77.072.540</b>	
	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.369.150	
	1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.703.390	
<b>01.02</b>	<b>1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.499.445.971</b>	
	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.108.932.211	
	1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	345.800.000	
	1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.713.760	
<b>01.03</b>	<b>1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>120.762.500</b>	
	1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.762.500	
	1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	
<b>01.04</b>	<b>1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>574.988.721</b>	
	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.739.585	
	1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.112.876	
	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.833.260	
	1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.069.250	
	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301.233.750	
<b>01.05</b>	<b>1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>522.784.470</b>	
	1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	87.111.690	
	1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	269.838.780	
	1.04.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	165.834.000	
<b>01.06</b>	<b>1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>167.500.000</b>	
	1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	



DPRKP/KOTA JAMBI/2025

	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.000.000	
<b>01.07</b>	<b>1.04.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>687.118.600</b>	
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	285.144.800	
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	235.473.800	
			166.500.000	
<b>2</b>	<b>01.04.02</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>680.684.417</b>	
<b>02.01</b>	<b>1.04.02.2.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	100.000.000	
<b>02.02</b>	<b>1.04.02.2.05</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>201.082.695</b>	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	201.082.695	
<b>02.03</b>	<b>1.04.02.2.06</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>379.601.722</b>	
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	98.333.204	
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	281.268.518	
<b>3</b>	<b>1.04.03</b>	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>2.659.168.840</b>	
<b>03.01</b>	<b>1.04.03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>54.529.900</b>	
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	54.529.900	
<b>03.02</b>	<b>1.04.03.2.02</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>278.117.870</b>	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	278.117.870	
<b>03.03</b>	<b>1.04.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>2.326.521.070</b>	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.292.550.390	
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	33.970.680	
<b>4</b>	<b>01.04.05</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>52.851.320.434</b>	



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

<b>04.01</b>	<b>1.04.05.2.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>52.851.320.434</b>	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	130.520.776	
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	52.562.814.727	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	131.940.209	
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	26.044.722	
		<b>Total</b>	<b>64.840.846.493</b>	

Untuk keterangan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dapat dijelaskan dalam pada tabel T-C.33 berikut ini:



**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**  
**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi**

No	Kode	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	Rencana			
							2025		2025	
							Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)
1	01.04.01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	7.802.656.819	BB	8.649.672.802
	1.04.01.2.01				<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Peningkatan Nilai AKIP	78	65.084.705	78	77.072.540
	1.04.01.2.01.0001				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	49.213.925	7 dokumen	59.369.150
	1.04.01.2.01.0007				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.870.780	1 Laporan	17.703.390



DPRKP/KOTA JAMBI/2025

1.04.01.2.02				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>6.431.341.831</b>	<b>100%</b>	<b>6.499.445.971</b>
1.04.01.2.02.0001				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	6.108.932.211	50 Orang	6.108.932.211
1.04.01.2.02.0003				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	293.240.000	1 Dokumen	345.800.000
1.04.01.2.02.0007				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	29.169.620	12 Laporan	44.713.760



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

	1.04.01.2.05				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>116.600.000</b>	<b>100%</b>	<b>120.762.500</b>
	1.04.01.2.05.0002				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	81 Paket	66.600.000	85 Paket	70.762.500
	1.04.01.2.05.0011				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000
	1.04.01.2.06				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>370.846.683</b>	<b>100%</b>	<b>574.988.721</b>



DPRKP/KOTA JAMBI/2025

1.04.01.2.06.0001				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.606.830	1 Paket	8.739.585
1.04.01.2.06.0002				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	163.877.143	1 Paket	192.112.876
1.04.01.2.06.0005				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	38.761.835	1 Paket	58.833.260
1.04.01.2.06.0008				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	15.671.813	5 Laporan	14.069.250



DPRKP/KOTA JAMBI/2025

1.04.01.2.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	144.929.063	30 Laporan	301.233.750
<b>1.04.01.2.07</b>				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>288.555.000</b>	<b>100%</b>	<b>522.784.470</b>
1.04.01.2.07.0005				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Isian Gedung Baru	198.545.000	44 unit	87.111.690
1.04.01.2.07.0006				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	90.010.000	14 unit	269.838.780
1.04.01.2.07.0007				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			2 unit	165.834.000



1.04.01.2.08					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>167.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>167.500.000</b>
1.04.01.2.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	2.760 Surat	2.500.000	3 Laporan	2.500.000
1.04.01.2.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000	12 Laporan	165.000.000
1.04.01.2.09					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>362.728.600</b>	<b>100%</b>	<b>687.118.600</b>



	1.04.01.2.09.0002				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	285.144.800	29 unit	285.144.800
	1.04.01.2.09.0006				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	77.583.800	96 unit	235.473.800
	1.04.01.2.09.0009				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara			1 Unit	166.500.000
<b>2</b>	<b>01.04.02</b>				<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR.</b>	<b>80,00%</b>	<b>577.200.911</b>	<b>85,00%</b>	<b>680.684.417</b>
	1.04.02.2.03				<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Korban Bencana</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000.000</b>
	1.04.02.2.03.0001				Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Terehabilitasi	10 Unit	100.000.000	10 unit	100.000.000
	1.04.02.2.05				<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>100,00%</b>	<b>134.469.754</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.082.695</b>



DPRKP/KOTA JAMBI/2025

1.04.02.2.05.0002				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	134.469.754	1 Dokumen	201.082.695
1.04.02.2.06				<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan</b>	<b>100,00%</b>	<b>342.731.157</b>	<b>100,00%</b>	<b>379.601.722</b>
1.04.02.2.06.0001				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	123.277.382	1 Dokumen	98.333.204
1.04.02.2.06.0003				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Laporan	219.453.775	5 Laporan	281.268.518
				<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani</b>	<b>79,97%</b>	<b>2.286.081.321</b>	<b>55,00%</b>	<b>2.659.168.840</b>
1.04.03.2.01				<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.991.275</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.529.900</b>



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

	1.04.03.2.01.0004				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	28.991.275	1 Laporan	54.529.900
	<b>1.04.03.2.02</b>				<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</b>	<b>79,97%</b>	<b>341.915.884</b>	<b>100,00%</b>	<b>278.117.870</b>
	1.04.03.2.02.0008				Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Review Kebijakan PKP yang disusun	2 Perda	341.915.884	2 Dokumen	278.117.870
	<b>1.04.03.2.03</b>				<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</b>	<b>37,83%</b>	<b>1.915.174.163</b>	<b>55,00%</b>	<b>2.326.521.070</b>
	1.04.03.2.03.0002				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	100 unit	1.895.998.628	100 unit	2.292.550.390
	1.04.03.2.03.0004				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	19.175.535	1 Laporan	33.970.680
<b>3</b>	<b>01.04.05</b>				<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.</b>	<b>94,62%</b>	<b>29.210.565.231</b>	<b>96,00%</b>	<b>52.851.320.434</b>
	<b>1.04.05.2.01</b>				<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.</b>	<b>94,62%</b>	<b>29.210.565.231</b>	<b>96,00%</b>	<b>52.851.320.434</b>
	1.04.05.2.01.0001				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	2 Dokumen	69.724.408	2 Dokumen	130.520.776



DPRKP/KOTA JAMBI/2025

	1.04.05.2.01.0002				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1750 Pemasangan PJU, 1750 Pemeliharaan PJU, 98 Pemeliharaan Makam, 15 Pembangunan Makam dan 2 Lokasi Jalan Lingkungan Perumahan	29.037.995.484	400 Lokasi	52.562.814.727
	1.04.05.2.01.0003				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10 Laporan	88.658.095	10 Laporan	131.940.209
	1.04.05.2.01.0010				Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Dokumen	14.187.245	1 Laporan	26.044.722
	<b>Total</b>							<b>39.876.504.282</b>		<b>64.840.846.493</b>



<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI</b>
---------------	---

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah– masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

##### **3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

**6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

**7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

Dengan Kegiatan Sebagai berikut :

**1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

**2. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

**3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan



### **3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

#### **2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

#### **3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.

### **4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

Dengan kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
- d. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA  
PERUBAHAN OPD)  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI TAHUN  
2025**

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	2025	
			Target Kinerja	Pagu (Rp)
1	<b>1.04.02 Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR.</b>	<b>85,00%</b>	<b>680.684.417</b>
	<b>1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Korban Bencana</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000.000</b>
	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Terehabilitasi	10 unit	100.000.000
	<b>1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.082.695</b>
	1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	201.082.695
	<b>1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan</b>	<b>100,00%</b>	<b>379.601.722</b>
	1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	98.333.204



DPRKP/KOTA JAMBI/2025

	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Laporan	281.268.518
2		<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani</b>	<b>55,00%</b>	<b>2.659.168.840</b>
	1.04.03.2.01	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.529.900</b>
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	54.529.900
	1.04.03.2.02	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</b>	<b>100,00%</b>	<b>278.117.870</b>
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen	278.117.870
	1.04.03.2.03	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani</b>	<b>55,00%</b>	<b>2.326.521.070</b>
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	100 unit	2.292.550.390
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	33.970.680
3	1.04.05	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.</b>	<b>96,00%</b>	<b>52.851.320.434</b>
	1.04.05.2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.</b>	<b>96,00%</b>	<b>52.851.320.434</b>
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	2 Dokumen	130.520.776



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	400 Lokasi	52.562.814.727
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10 Laporan	131.940.209
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	26.044.722
<b>4</b>	<b>1.04.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>BB</b>	<b>8.649.672.802</b>
	<b>1.04.01.2.01</b>	<b><u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u></b>	<b>Peningkatan Nilai AKIP</b>	<b>78</b>	<b>77.072.540</b>
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	59.369.150
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	17.703.390
	<b>1.04.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>6.499.445.971</b>
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	6.108.932.211
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	345.800.000
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	44.713.760
	<b>1.04.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>120.762.500</b>



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	70.762.500
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000.000
<b>1.04.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>574.988.721</b>
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.739.585
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	192.112.876
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	58.833.260
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	14.069.250
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	301.233.750
<b>1.04.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>522.784.470</b>
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 unit	87.111.690
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit	269.838.780
1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 unit	165.834.000
<b>1.04.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>167.500.000</b>
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	3 Laporan	2.500.000
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

1.04.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>687.118.600</b>
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	285.144.800
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	235.473.800
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	166.500.000
<b>Total</b>				<b>64.840.846.493</b>

**BAB V**

**PENUTUP**

Salah satu upaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada Masyarakat pada sektor perumahan rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi senantiasa berusaha untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2025 dan RKPD Kota Jambi. Namun kami menyadari bahwa program dan kegiatan yang sudah kami tuangkan dalam Rencana Kerja Perubahan sebagai rujukan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum maksimal .

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Evaluasi yang di laksanakan ada beberapa kegiatan yang belum dapat di laksanakan , hal ini disebabkan karena masih terbatasnya Anggaran yang tersedia .
- Ada beberapa kegiatan yang progressnya belum maksimal, hal ini disebabkan karena sarana penunjang perlu ditingkatkan.
- Ada beberapa kegiatan yang progressnya telah maksimal.

Untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan sektor perumahan kepada masyarakat maka diharapkan ada peningkatan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, sehingga capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara maksimal dan komprehensif.



**DPRKP/KOTA JAMBI/2025**

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang transparan dan akuntabel serta komprehensif maka pembangunan perumahan dan prasarana , sarana dan utilitas pendukung dapat berjalan secara baik dan optimal sehingga semua pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya dapat mendukung visi, misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Ada beberapa hal yang secara terus-menerus perlu mendapat perhatian sehingga kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara bertahap dapat dipenuhi. Sebagai upaya untuk melakukan percepatan pemenuhan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni harus dilaksanakan melalui berbagai sumber dana, diantaranya adalah dana APBD, APBN serta peran aktif seluruh masyarakat yang di usulkan secara hirarkhi melalui Simreda milik Pemerintah Kota Jambi.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini kami buat sesuai dengan ketentuan-ketentuan / aturan-aturan yang lebih berlaku dan kebijakan Kepala daerah dan Dewan yang terhormat. Hal ini perlu dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan penyesuaian penyesuaian dengan kebutuhan yang diperlukan.

Demikian untuk di maklumi terima kasih.

Jambi, 24 Juni 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA JAMBI



MAHRUZAR, ST

Pembina Tk.I

NIP. 19780127 200501 1 004